



PETUNJUK TEKNIS

PROGRAM & KEGIATAN

POKJA I TP PKK

2025-2029



TIM PENYUSUN PETUNJUK TEKNIS

Pengarah
Ketua Umum TP PKK
Ny. Tri Tito Karnavian

Penanggung Jawab
Ketua Bidang Pembinaan Karakter Keluarga
drg. Indah Ayu Farahestin

Staf Ahli Bidang Pendidikan dan Pembinaan Karakter
Irjen Pol (Purn) Dra. Sri Handayani, M.H

Anggota:

- 1. *Ketua Pokja I:***
Simon Makarios Aruan, S.IP., M.Si., M.H
- 2. *Wakil Ketua Pokja I:***
Aniek Anani Kurniadi, BA
- 3. *Sekretaris Pokja I:***
Ade Anggeriani Massal, S.IP
- 4. *Anggota Pokja I***
 - 1) Tintin Ryanti, SS., M.Kesos**
 - 2) Redo Frandika, S.AP**

TP PKK PUSAT
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Petunjuk Teknis (Juknis) Kelompok Kerja I Tim Penggerak PKK dapat diselesaikan.

Pokja I Tim Penggerak PKK yang membidangi Pembinaan Karakter Keluarga serta mengemban tugas menjalankan program pokok PKK dalam hal Penghayatan dan Pengamalan Pancasila & Gotong Royong, memiliki peran strategis dalam memperkuat ideologi bangsa, membangun karakter keluarga Indonesia, serta meningkatkan ketahanan keluarga di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh pengurus dan kader PKK di semua jenjang (TP PKK Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa) dalam melaksanakan program kerja Pokja I secara terarah, terencana, terukur, dan berkesinambungan. Diharapkan melalui pedoman ini, pelaksanaan 10 Program Pokok PKK khususnya pada lingkup Pokja I dapat lebih optimal, inovatif, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas keluarga Indonesia.

Bidang Pembinaan Karakter Keluarga menghaturkan terimakasih kepada Ny. Tri Tito Karnavian selaku Ketua Umum TP PKK yang telah memberikan arahan serta petunjuk kepada kami dalam menyusun Petunjuk Teknis.

Kami menyadari bahwa penyusunan juknis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Petunjuk Teknis Kelompok Kerja I Tim Penggerak PKK ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat serta memberikan kontribusi positif bagi terciptanya keluarga sejahtera, berkarakter, dan tangguh menghadapi berbagai tantangan.

Jakarta, November 2025

Hormat Kami,

Bidang Pembinaan Karakter Keluarga
Tim Penggerak PKK Pusat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan.....	2
D. Ruang Lingkup	3
BAB II.....	5
A. PAAREDI	5
B. Program Prioritas Pokja I.....	8
1. Keluarga Indonesia Sejahtera Harmonis (KISAH)	8
2. Keluarga Indonesia Sehat Tanpa Narkoba (KRISAN)	13
3. Keluarga Indonesia Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual (KILAS)	15
4. Keluarga Indonesia Anti Trafficking (KIAT).....	17
5. Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN)	20
6. Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (KISAK).....	25
BAB III.....	29
A. Pembinaan	29
B. Pengawasan	29
BAB IV.....	31
A. Pemantauan dan Evaluasi.....	31
B. Pelaporan.....	31
BAB V.....	33
BAB VI.....	35
LAMPIRAN	37



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Sebagai salah satu kelompok kerja dalam struktur organisasi PKK, Pokja I memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi PKK, khususnya dalam bidang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila serta Gotong Royong. Pokja I berfokus pada penguatan nilai-nilai kebangsaan, keimanan, dan akhlak mulia sebagai pondasi utama dalam membangun keluarga yang sejahtera, harmonis, dan bermartabat.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Pokja I memerlukan panduan yang jelas, terstruktur, dan terukur agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan efektif, efisien, dan selaras dengan tujuan PKK secara keseluruhan. Petunjuk Teknis (Juknis) ini disusun untuk memberikan arah, pedoman, dan langkah-langkah operasional bagi pengurus dan anggota Pokja I di semua tingkatan, mulai dari pusat hingga kelurahan/desa. Juknis ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan memiliki dampak nyata bagi keluarga dan masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Perubahan dinamika sosial, tantangan globalisasi, dan perkembangan teknologi menuntut Pokja I untuk terus beradaptasi dan berinovasi dalam melaksanakan program pembinaan. Oleh karena itu, Juknis ini hadir untuk mengakomodasi pendekatan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era saat ini.

Dengan adanya Juknis ini, diharapkan Pokja I dapat melaksanakan tugasnya secara optimal, terkoordinasi, dan berkontribusi signifikan dalam mewujudkan keluarga Indonesia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sejahtera, dan mandiri.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan

5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
8. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
9. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
12. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari adanya Juknis (Petunjuk Teknis) Pelaksanaan Program Kerja Pokja I adalah untuk memberikan panduan yang jelas, terperinci, dan terstandar dalam pelaksanaan kegiatan atau program Pokja I agar berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan dari adanya Juknis (Petunjuk Teknis) Pelaksanaan Program Kerja Pokja I adalah adanya panduan yang jelas sehingga pelaksanaan kegiatan dan program Pokja I dapat dilakukan dengan

tepat tanpa membuang waktu atau sumber daya; memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan dan kebijakan; mengurangi risiko kesalahan serta memberikan dasar untuk pengawasan, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis pelaksanaan program kerja pokja I adalah:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Mekanisme Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pokja I

BAB III : Pembinaan dan Pengawasan

BAB IV : Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

BAB V : Penganggaran

BAB VI : Penutup



BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN POKJA I

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN POKJA I

A. PAAREDI

Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak dapat berinteraksi. Pengaruh keluarga dalam pembentukan dan perkembangan kepribadian sangatlah besar artinya. Banyak faktor dalam keluarga yang ikut berpengaruh dalam proses perkembangan anak. Salah satu faktor dalam keluarga yang mempunyai peranan penting dalam pembentukan kepribadian adalah pola asuh yang diterapkan orangtua. Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat Brown (1961: 76) yang mengatakan bahwa keluarga adalah lingkungan yang pertama kali menerima kehadiran anak.

Orangtua mempunyai berbagai macam fungsi yang salah satu di antaranya ialah mengasuh putra-putrinya. Dalam mengasuh anaknya orangtua dipengaruhi oleh budaya dan tradisi yang ada di lingkungannya. Di samping itu, orang tua juga diwarnai oleh sikap-sikap tertentu dalam memelihara, membimbing, dan mengarahkan putra-putrinya. Sikap tersebut tercermin dalam pola pengasuhan kepada anaknya yang berbeda-beda, karena orang tua mempunyai pola pengasuhan tertentu.

Sebagai pengasuh dan pembimbing dalam keluarga, orang tua sangat berperan dalam meletakkan dasar-dasar perilaku bagi anak-anaknya. Sikap, perilaku, dan kebiasaan orangtua selalu dilihat, dinilai, dan ditiru oleh anaknya yang kemudian semua itu secara sadar atau tidak sadar diresapinya dan kemudian menjadi kebiasaan pula bagi anak-anaknya. Hal demikian disebabkan karena anak mengidentifikasikan dengan orang lain. (Bonner 1953: 207). Faktor lingkungan sosial memiliki sumbangannya terhadap perkembangan tingkah laku individu (anak) ialah keluarga khususnya orangtua terutama pada masa awal (kanak-kanak) sampai masa remaja. Dalam mengasuh anaknya orangtua cenderung menggunakan pola asuh tertentu. Penggunaan pola asuh tertentu ini memberikan sumbangan dalam mewarnai perkembangan terhadap bentuk-bentuk perilaku tertentu pada anaknya. Salah satu perilaku yang muncul dapat berupa perilaku agresif. Pola asuh orangtua merupakan interaksi antara anak dan orangtua selama mengadakan kegiatan pengasuhan. Pengasuhan ini berarti orangtua mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak untuk mencapai kedewasaan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Kohn (dalam Taty Krisnawaty, 1986: 46) menyatakan bahwa pola asuhan merupakan sikap orangtua

dalam berinteraksi dengan anak-anaknya. Sikap orangtua ini meliputi cara orang tua memberikan aturanaturan, hadiah maupun hukuman, cara orangtua menunjukkan otoritasnya, dan cara orangtua memberikan perhatian serta tanggapan terhadap anaknya. Dalam melakukan tugas-tugas perkembangannya, individu banyak dipengaruhi oleh peranan orangtua tersebut. Peranan orangtua itu memberikan lingkungan yang memungkinkan anak dapat menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya.

Keluarga sebagai salah satu trisentra pendidikan merupakan tempat pendidikan yang pertama dan utama bagi pembentukan karakter anak. Keluarga sebagai locus pembentukan karakter anak perlu mengembangkan pola asuh atau pola interaksi yang edukatif dan efektif. Pola asuh yang dilakukan orang tua terhadap anak bertujuan untuk melayani kebutuhan fisik dan psikologis anak. Selain itu, pola asuh tersebut dapat diimplementasikan dalam bentuk sosialisasi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat supaya anak-anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya. Pola asuh anak dalam keluarga terdiri dari empat (4) kategori, yaitu :

1. Pola asuh otoriter;
2. Pola asuh permisif;
3. Pola asuh yang kurang memiliki tuntutan terhadap anak dan kurang responsif terhadap kebutuhan anak (orang un-involved);
4. Pola asuh demokratis atau berwibawa (authoritative).

Orang tua harus terlibat dalam mendidik anak dengan pola asuh yang demokratis, positif, efektif, konstruktif dan transformatif. Orang tua harus mendidik anak bukan dengan kekerasan atau paksaan, tetapi memberi kebebasan dengan suatu kontrol yang ketat supaya anak bertumbuh dan berkembang secara positif dan baik. Pola asuh yang dibutuhkan pada era digital adalah pola asuh yang demokratis atau berwibawa (authoritative). Pola asuh ini berupaya membantu anak agar bersikap kritis terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari era digital. Oleh karena itu, orangtua harus mampu berperan untuk mendidik dan membimbing anak supaya menggunakan media digital untuk tujuan yang benar dan positif.

Landasan Hukum Panduan PAAREDI

Internasional

**DEKLARASI UNIVERSAL
HAK-HAK ASASI
MANUSIA**
10 Desember 1948 melalui
resolusi 217 A (III)

**Konvensi Hak Anak
(Convention on The
Rights of The Child)**



Nasional

PANCASILA

UUD 45

Undang-Undang

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
3. UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
4. UU Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaaan
5. UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
6. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak
7. UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Pemerintah

1. PP Nomor 60 tahun 2013 Tentang Pengembangan anak Usia Dini Holistik-Integratif
2. PP Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
3. PP Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
4. PP Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024
5. PP Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak

Keputusan Presiden

1. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Peraturan Menteri

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan
2. 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-3514 Tahun 2016 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015

B. Program Prioritas Pokja I

1. Keluarga Indonesia Sejahtera Harmonis (KISAH)

NO	Uraian	Keterangan
1	Nama Kegiatan	Judol Pinjol Teratasi (JUPITER)
2	Tujuan Kegiatan	Setelah mengikuti kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko dan dampak negatif judi online; menjaga kesejahteraan individu dan keluarga dari efek buruk judi online seperti utang, konflik keluarga, dan penurunan produktivitas.
3	Sasaran/Target	1. Kader PKK 2. Pelajar 3. Mahasiswa 4. Masyarakat
4	Tempat/Lokasi	1. Kantor Pemerintahan 2. Sekolah 3. Ruang Publik
5	Pelaksana	1. TP PKK Pusat 2. TP PKK Provinsi 3. TP PKK Kabupaten/Kota 4. TP PKK Kecamatan 5. TP PKK Desa/Kelurahan
6	Materi	1. Tentang Bahaya Judi Online 2. Tentang Bahaya Pinjaman Online Ilegal
7	Unsur Narasumber	Pelaksana TP PKK PUSAT 1. POLRI 2. Kementerian Komunikasi dan Digital 3. Otoritas Jasa Keuangan 4. Narasumber lain yang terkait
		Pelaksana TP PKK Provinsi 1. POLRI 2. TP PKK Pusat 3. Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika 4. Perwakilan OJK 5. Narasumber lain yang terkait
		Pelaksana TP PKK Kabupaten/Kota 1. POLRI 2. TP PKK Provinsi 3. Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika 4. Perwakilan OJK 5. Narasumber lain yang terkait
		Pelaksana TP PKK Kecamatan 1. POLRI 2. TP PKK Kabupaten/Kota 3. Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika

		4. Narasumber lain yang terkait Pelaksana TP PKK Desa/Kelurahan 1. TP PKK Kecamatan 2. POLRI (Babinkantibmas) 3. TNI (Babinsa) 4. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan 5. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama 6. Narasumber lain yang terkait
8	Mitra Kerja	1. POLRI 2. Kementerian Komunikasi dan Digital 3. Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika 4. Otoritas Jasa Keuangan
9	Laporan Kegiatan	Laporan Kegiatan paling sedikit terdiri dari: 1. Judul Laporan 2. Pendahuluan terdiri dari: • Latar Belakang • Tujuan Kegiatan • Ruang Lingkup 3. Informasi Kegiatan terdiri dari: • Nama Kegiatan • Waktu Pelaksanaan • Lokasi • Narasumber • Peserta • Rundown Acara • Sumber Anggaran 4. Penutup terdiri dari: • Kesimpulan • Saran 5. Lampiran terdiri dari: • Dokumentasi • Data Pendukung (seperti Daftar Hadir, Materi Kegiatan, dll)
10	Metode Kegiatan	Sosialisasi, Ceramah, Lomba, Beberan

NO	Uraian	Keterangan
1	Nama Kegiatan	Cegah Perkawinan Anak (CEPAK)
2	Tujuan Kegiatan	Setelah mengikuti kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, Mencegah risiko kesehatan akibat perkawinan dini, serta memutus siklus kemiskinan dengan memberikan anak kesempatan untuk memperoleh keterampilan dan pekerjaan yang lebih baik sebelum menikah, Mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif perkawinan anak, baik dari aspek sosial, ekonomi,

		maupun hukum, serta mempromosikan kesetaraan gender.
3	Sasaran/Target	1. Kader PKK 2. Pelajar 3. Mahasiswa 4. Masyarakat
4	Tempat/Lokasi	1. Kantor Pemerintahan 2. Sekolah 3. Ruang Publik
5	Pelaksana	1. TP PKK Pusat 2. TP PKK Provinsi 3. TP PKK Kabupaten/Kota 4. TP PKK Kecamatan 5. TP PKK Desa/Kelurahan
6	Materi	Tentang Dampak Pernikahan Anak dari aspek sosial, ekonomi, kesehatan, Agama, psikologis, maupun hukum,
7	Unsur Narasumber	Pelaksana TP PKK PUSAT 1. Kementerian PPPA 2. Mahkamah Agung 3. Kementerian Agama 4. Kementerian Kesehatan 5. BKKBN 6. Kementerian Sosial 7. Narasumber lain yang terkait
		Pelaksana TP PKK Provinsi 1. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Pengadilan Agama 3. Kanwil Kemenag 4. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kesehatan 5. TP PKK Pusat 6. Narasumber lain yang terkait
		Pelaksana TP PKK Kabupaten/Kota 1. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Pengadilan Agama 3. Kanwil Kemenag 4. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kesehatan 5. TP PKK Provinsi 6. Narasumber lain yang terkait
		Pelaksana TP PKK Kecamatan 1. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Pengadilan Agama 3. Kanwil Kemenag

		4. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kesehatan 5. TP PKK Kabupaten/Kota 6. Narasumber lain yang terkait
		Pelaksana TP PKK Desa/Kelurahan 1. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kesehatan 2. TP PKK Kecamatan 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan 4. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama 5. Narasumber lain yang terkait
8	Mitra Kerja	1. Kementerian PPPA 2. Mahkamah Agung 3. Kementerian Agama 4. Kementerian Kesehatan 5. BKKBN 6. Kementrian Sosial 7. NGO/Ormas Terkait
9	Laporan Kegiatan	Laporan Kegiatan paling sedikit terdiri dari: 1. Judul Laporan 2. Pendahuluan terdiri dari: • Latar Belakang • Tujuan Kegiatan • Ruang Lingkup 3. Informasi Kegiatan terdiri dari: • Nama Kegiatan • Waktu Pelaksanaan • Lokasi • Narasumber • Peserta • Rundown Acara • Sumber Anggaran 4. Penutup terdiri dari: • Kesimpulan • Saran 5. Lampiran terdiri dari: • Dokumentasi • Data Pendukung (seperti Daftar Hadir, Materi Kegiatan, dll)
10	Metode Kegiatan	Sosialisasi, Ceramah, Lomba, Beberan

NO	Uraian	Keterangan
1	Nama Kegiatan	Lansia Siap (LANSIAP)
2	Tujuan Kegiatan	Setelah mengikuti kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mempersiapkan diri ketika memasuki usia Lansia; menjaga kesehatan fisik dan mental; mempererat hubungan sosial; meningkatkan kualitas hidup; mendapatkan dukungan emosional; serta

		memberdayakan lansia agar tetap mandiri dan relevan dengan perkembangan zaman.
3	Sasaran/Target	1. Kader PKK 2. Masyarakat
4	Tempat/Lokasi	1. Kantor Pemerintahan 2. Ruang Publik
5	Pelaksana	1. TP PKK Pusat 2. TP PKK Provinsi 3. TP PKK Kabupaten/Kota 4. TP PKK Kecamatan 5. TP PKK Desa/Kelurahan
6	Materi	Tentang Persiapan Memasuki Usia Lansia dan Lansia Tetap Produktif
7	Unsur Narasumber	Pelaksana TP PKK PUSAT 1. Bappenas 2. Kemenko PMK 3. BKKBN 4. Kementerian Sosial 5. Kementerian Kesehatan 6. Kementerian PPPA 7. Narasumber lain yang terkait
		Pelaksana TP PKK Provinsi 1. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Sosial 3. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kesehatan 4. TP PKK Pusat 5. Narasumber lain yang terkait
		Pelaksana TP PKK Kabupaten/Kota 1. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Sosial 3. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kesehatan 4. TP PKK Provinsi 5. Narasumber lain yang terkait
		Pelaksana TP PKK Kecamatan 1. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Sosial 3. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kesehatan 4. TP PKK Kabupaten/Kota 5. Narasumber lain yang terkait
		Pelaksana TP PKK Desa/Kelurahan

		1. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Sosial 3. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kesehatan 4. TP PKK Kecamatan 5. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan 6. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama 7. Narasumber lain yang terkait
8	Mitra Kerja	1. Bappenas 2. Kemenko PMK 3. BKKBN 4. Kementerian Sosial 5. Kementerian Kesehatan 6. Kementerian PPPA 7. NGO/Ormas Terkait
9	Laporan Kegiatan	Laporan Kegiatan paling sedikit terdiri dari: 1. Judul Laporan 2. Pendahuluan terdiri dari: • Latar Belakang • Tujuan Kegiatan • Ruang Lingkup 3. Informasi Kegiatan terdiri dari: • Nama Kegiatan • Waktu Pelaksanaan • Lokasi • Narasumber • Peserta • Rundown Acara • Sumber Anggaran 4. Penutup terdiri dari: • Kesimpulan • Saran 5. Lampiran terdiri dari: • Dokumentasi • Data Pendukung (seperti Daftar Hadir, Materi Kegiatan, dll)
10	Metode Kegiatan	Sosialisasi, Ceramah, Lomba, Beberan

2. Keluarga Indonesia Sehat Tanpa Narkoba (KRISAN)

NO	Uraian	Keterangan
1	Nama Kegiatan	Keluarga Indonesia Sehat Tanpa Narkoba (KRISAN)
2	Tujuan Kegiatan	Setelah mengikuti kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba; menjaga

		masyarakat agar terhindar dari narkoba; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan narkoba seperti melaporkan aktivitas mencurigakan atau mendukung rehabilitasi pengguna; menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari narkoba sehingga masyarakat memiliki gaya hidup sehat seperti rajin berolahraga, seni atau hobi positif
3	Sasaran/Target	1. Kader PKK 2. Pelajar 3. Mahasiswa 4. Masyarakat
4	Tempat/Lokasi	1. Kantor Pemerintahan 2. Sekolah 3. Ruang Publik
5	Pelaksana	1. TP PKK Pusat 2. TP PKK Provinsi 3. TP PKK Kabupaten/Kota 4. TP PKK Kecamatan 5. TP PKK Desa/Kelurahan
6	Materi	Tentang Pencegahan dan Rehabilitasi Social Penyalahgunaan Narkotika
7	Unsur Narasumber	Pelaksana TP PKK PUSAT 1. BNN RI 2. POLRI 3. Narasumber terkait lainnya
		Pelaksana TP PKK Provinsi 1. BNN Provinsi 2. POLRI 3. TP PKK Pusat 4. Narasumber terkait lainnya
		Pelaksana TP PKK Kabupaten/Kota 1. BNN Provinsi 2. POLRI 3. TP PKK Provinsi 4. Narasumber terkait lainnya
		Pelaksana TP PKK Kecamatan 1. POLRI 2. TP PKK Kabupaten/Kota 3. Narasumber terkait lainnya
		Pelaksana TP PKK Desa/Kelurahan 1. TP PKK Kecamatan 2. POLRI (Babinkantibmas) 3. TNI (Babinsa) 4. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan 5. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama
8	Mitra Kerja	1. BNN 2. POLRI
9	Laporan Kegiatan	Laporan Kegiatan paling sedikit terdiri dari: 1. Judul Laporan 2. Pendahuluan terdiri dari:

		• Latar Belakang • Tujuan Kegiatan • Ruang Lingkup 3. Informasi Kegiatan terdiri dari: • Nama Kegiatan • Waktu Pelaksanaan • Lokasi • Narasumber • Peserta • Rundown Acara • Sumber Anggaran 4. Penutup terdiri dari: • Kesimpulan • Saran 5. Lampiran terdiri dari: • Dokumentasi • Data Pendukung (seperti Daftar Hadir, Materi Kegiatan, dll)
10	Metode Kegiatan	Sosialisasi, Ceramah, Rehabilitasi, Bimbingan Teknis Peningkatan Kader PKK, Beberan

3. Keluarga Indonesia Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual (KILAS)

NO	Uraian	Keterangan
1	Nama Kegiatan	Keluarga Indonesia Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual (KILAS)
2	Tujuan Kegiatan	Setelah mengikuti kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan proaktif agar anak terhindar dari tindakan kekerasan seksual; mengedukasi anak, keluarga, dan masyarakat tentang bahaya kekerasan seksual serta cara pencegahannya; menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak secara fisik, psikis, dan sosial; memastikan pelaku kekerasan seksual ditindak tegas sesuai hukum untuk memberikan efek jera; memberikan dukungan psikologis, medis, dan sosial bagi anak korban kekerasan seksual untuk pemulihan trauma.
3	Sasaran/Target	1. Kader PKK 2. Pelajar 3. Mahasiswa 4. Masyarakat
4	Tempat/Lokasi	1. Kantor Pemerintahan 2. Sekolah 3. Ruang Publik
5	Pelaksana	1. TP PKK Pusat 2. TP PKK Provinsi 3. TP PKK Kabupaten/Kota

		4. TP PKK Kecamatan 5. TP PKK Desa/Kelurahan
6	Materi	Tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual
7	Unsur Narasumber	Pelaksana TP PKK PUSAT 1. Kemenko PMK 2. Kementerian PPPA 3. POLRI 4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 5. Kementerian Sosial 6. Komnas Perempuan 7. Kementerian HAM 8. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 9. Narasumber lain yang terkait
		Pelaksana TP PKK Provinsi 1. POLRI 2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 3. Komnas Perempuan 4. Kementerian HAM 5. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Sosial 7. TP PKK Pusat 8. Narasumber lain yang terkait
		Pelaksana TP PKK Kabupaten/Kota 1. POLRI 2. Komnas Perempuan 3. Kementerian HAM 4. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Sosial 6. TP PKK Provinsi 7. Narasumber lain yang terkait
		Pelaksana TP PKK Kecamatan 1. POLRI 2. Komnas Perempuan 3. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Sosial 5. TP PKK Kabupaten/Kota 6. Narasumber lain yang terkait
		Pelaksana TP PKK Desa/Kelurahan 1. POLRI (Bhabinkantibmas)

		2. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Sosial 4. TP PKK Kecamatan 5. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan 6. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama 7. Narasumber lain yang terkait
8	Mitra Kerja	1. Kemenko PMK 2. Kementerian PPPA 3. POLRI 4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 5. Kementerian Sosial 6. Komnas Perempuan 7. Kementerian HAM 8. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 9. NGO/Ormas Terkait
9	Laporan Kegiatan	Laporan Kegiatan paling sedikit terdiri dari: 1. Judul Laporan 2. Pendahuluan terdiri dari: • Latar Belakang • Tujuan Kegiatan • Ruang Lingkup 3. Informasi Kegiatan terdiri dari: • Nama Kegiatan • Waktu Pelaksanaan • Lokasi • Narasumber • Peserta • Rundown Acara • Sumber Anggaran 4. Penutup terdiri dari: • Kesimpulan • Saran 5. Lampiran terdiri dari: • Dokumentasi • Data Pendukung (seperti Daftar Hadir, Materi Kegiatan, dll)
10	Metode Kegiatan	Sosialisasi, Ceramah, Lomba, Pendampingan dan Advokasi, dan Beberan

4. Keluarga Indonesia Anti Trafficking (KIAT)

NO	Uraian	Keterangan
1	Nama Kegiatan	Keluarga Indonesia Anti Trafficking (KIAT)
2	Tujuan Kegiatan	Setelah mengikuti kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan modus perdagangan manusia untuk mengurangi kasus baru; memberikan

		perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi korban perdagangan manusia, termasuk dukungan fisik, psikologis, dan hukum; mendorong penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia melalui penyelidikan, penuntutan, dan pemberian sanksi yang tegas; mengadvokasi kebijakan dan regulasi yang mendukung pencegahan dan penanganan perdagangan manusia.
3	Sasaran/Target	1. Kader PKK 2. Pelajar 3. Mahasiswa 4. Masyarakat
4	Tempat/Lokasi	1. Kantor Pemerintahan 2. Sekolah 3. Ruang Publik
5	Pelaksana	1. TP PKK Pusat 2. TP PKK Provinsi 3. TP PKK Kabupaten/Kota 4. TP PKK Kecamatan 5. TP PKK Desa/Kelurahan
6	Materi	Tentang Cara Mencegah Perdagangan Manusia
7	Unsur Narasumber	Pelaksana TP PKK PUSAT 1. Kemenko Polkam 2. Kemenko PMK 3. POLRI 4. Kementerian PPPA 5. Kementerian Luar Negeri 6. Kementerian Dalam Negeri 7. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) 8. BNPP 9. Kementerian HAM 10. Kementerian Sosial 11. Narasumber lain yang terkait
		Pelaksana TP PKK Provinsi 1. POLRI 2. BNPP 3. Kementerian HAM 4. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5. TP PKK Pusat 6. Narasumber lain yang terkait
		Pelaksana TP PKK Kabupaten/Kota 1. POLRI 2. Kementerian HAM 3. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4. TP PKK Provinsi

		5. Narasumber lain yang terkait
		Pelaksana TP PKK Kecamatan 1. POLRI 2. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. TP PKK Kabupaten/Kota 4. Narasumber lain yang terkait
		Pelaksana TP PKK Desa/Kelurahan 1. POLRI (Bhabinkamtibmas) 2. TNI (Babinsa) 3. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4. TP PKK Kecamatan 5. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan 6. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama 7. Narasumber lain yang terkait
8	Mitra Kerja	1. Kemenko Polkam 2. Kemenko PMK 3. POLRI 4. Kementerian PPPA 5. Kementerian Luar Negeri 6. Kementerian Dalam Negeri 7. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) 8. BNPP 9. Kementerian HAM 10. NGO/Ormas Terkait
9	Laporan Kegiatan	Laporan Kegiatan paling sedikit terdiri dari: 1. Judul Laporan 2. Pendahuluan terdiri dari: • Latar Belakang • Tujuan Kegiatan • Ruang Lingkup 3. Informasi Kegiatan terdiri dari: • Nama Kegiatan • Waktu Pelaksanaan • Lokasi • Narasumber • Peserta • Rundown Acara • Sumber Anggaran 4. Penutup terdiri dari: • Kesimpulan • Saran 5. Lampiran terdiri dari: • Dokumentasi • Data Pendukung (seperti Daftar Hadir, Materi Kegiatan, dll)
10	Metode Kegiatan	Sosialisasi, Ceramah, Lomba, Pendampingan dan Advokasi, dan Beberan

5. Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN)

NO	Uraian	Keterangan
1	Nama Kegiatan	PKK SIP (Sosialisasi Ideologi Pancasila)
2	Tujuan Kegiatan	Setelah mengikuti kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi negara dan pedoman kehidupan berbangsa; menanamkan rasa cinta tanah air, persatuan, dan kesadaran akan identitas bangsa Indonesia; mengajak masyarakat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; membentuk sikap mental yang berlandaskan moral Pancasila untuk menciptakan generasi yang bermartabat dan beretika; menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman budaya, suku, dan agama di Indonesia.
3	Sasaran/Target	1. Kader PKK 2. Pelajar 3. Mahasiswa 4. Masyarakat
4	Tempat/Lokasi	1. Kantor Pemerintahan 2. Sekolah 3. Ruang Publik
5	Pelaksana	1. TP PKK Pusat 2. TP PKK Provinsi 3. TP PKK Kabupaten/Kota 4. TP PKK Kecamatan 5. TP PKK Desa/Kelurahan
6	Materi	Tentang Ideologi Pancasila dan Penerapannya dalam Kehidupan Sehari-hari
7	Unsur Narasumber	Pelaksana TP PKK PUSAT 1. Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) 2. Kementerian Komunikasi dan Digital 3. Institusi Pendidikan 4. Narasumber lain yang terkait
		Pelaksana TP PKK Provinsi 1. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 2. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Komunikasi dan Digital 3. Institusi Pendidikan 4. TP PKK Pusat 5. Narasumber lain yang terkait
		Pelaksana TP PKK Kabupaten/Kota 1. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 2. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Komunikasi dan Digital

		3. Institusi Pendidikan 4. TP PKK Provinsi 5. Narasumber lain yang terkait
		Pelaksana TP PKK Kecamatan 1. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 2. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Komunikasi dan Digital 3. Institusi Pendidikan 4. TP PKK Kabupaten/Kota 5. Narasumber lain yang terkait
		Pelaksana TP PKK Desa/Kelurahan 1. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 2. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Komunikasi dan Digital 3. Institusi Pendidikan 4. TP PKK Kecamatan 5. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan 6. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama 7. Narasumber lain yang terkait
8	Mitra Kerja	1. Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) 2. Kementerian Komunikasi dan Digital 3. Institusi Pendidikan 4. NGO/Ormas Terkait
9	Laporan Kegiatan	Laporan Kegiatan paling sedikit terdiri dari: 1. Judul Laporan 2. Pendahuluan terdiri dari: • Latar Belakang • Tujuan Kegiatan • Ruang Lingkup 3. Informasi Kegiatan terdiri dari: • Nama Kegiatan • Waktu Pelaksanaan • Lokasi • Narasumber • Peserta • Rundown Acara • Sumber Anggaran 4. Penutup terdiri dari: • Kesimpulan • Saran 5. Lampiran terdiri dari: • Dokumentasi • Data Pendukung (seperti Daftar Hadir, Materi Kegiatan, dll)
10	Metode Kegiatan	Sosialisasi, Ceramah, Lomba, dan Beberan

NO	Uraian	Keterangan
1	Nama Kegiatan	Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)
2	Tujuan Kegiatan	Setelah mengikuti kegiatan ini diharapkan dapat membentuk keluarga yang memahami, menghormati, dan mematuhi hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; meningkatkan ketahanan dan harmoni keluarga melalui pemahaman hukum, sehingga tercipta lingkungan keluarga yang taat hukum dan mendukung pembangunan nasional; membantu menciptakan masyarakat yang sadar hukum, sehingga mendukung supremasi hukum dan keadilan sosial.
3	Sasaran/Target	1. Kader PKK 2. Pelajar 3. Mahasiswa 4. Masyarakat
4	Tempat/Lokasi	1. Kantor Pemerintahan 2. Sekolah 3. Ruang Publik
5	Pelaksana	1. TP PKK Pusat 2. TP PKK Provinsi 3. TP PKK Kabupaten/Kota 4. TP PKK Kecamatan 5. TP PKK Desa/Kelurahan
6	Materi	Tentang Pentingnya Hukum
7	Unsur Narasumber	Pelaksana TP PKK PUSAT 1. Kementerian Hukum 2. Kejaksaan 3. POLRI 4. KPK 5. Narasumber lain yang terkait
		Pelaksana TP PKK Provinsi 1. Kementerian Hukum 2. Kejaksaan 3. POLRI 4. TP PKK Pusat 5. Narasumber lain yang terkait
		Pelaksana TP PKK Kabupaten/Kota 1. Kejaksaan 2. POLRI 3. TP PKK Provinsi 4. Narasumber lain yang terkait
		Pelaksana TP PKK Kecamatan 1. POLRI 2. TP PKK Kabupaten/Kota 3. Narasumber lain yang terkait

		Pelaksana TP PKK Desa/Kelurahan 1. Kejaksaan 2. POLRI (Bhabinkantibmas) 3. TP PKK Kecamatan 4. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan 5. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama 6. Narasumber lain yang terkait
8	Mitra Kerja	1. Kementerian Hukum 2. Kejaksaan 3. POLRI 4. NGO/Ormas Terkait
9	Laporan Kegiatan	Laporan Kegiatan paling sedikit terdiri dari: 1. Judul Laporan 2. Pendahuluan terdiri dari: • Latar Belakang • Tujuan Kegiatan • Ruang Lingkup 3. Informasi Kegiatan terdiri dari: • Nama Kegiatan • Waktu Pelaksanaan • Lokasi • Narasumber • Peserta • Rundown Acara • Sumber Anggaran 4. Penutup terdiri dari: • Kesimpulan • Saran 5. Lampiran terdiri dari: • Dokumentasi • Data Pendukung (seperti Daftar Hadir, Materi Kegiatan, dll)
10	Metode Kegiatan	Sosialisasi, Ceramah, Lomba, dan Beberan

NO	Uraian	Keterangan
1	Nama Kegiatan	PKK Hadir
2	Tujuan Kegiatan	Setelah mengikuti kegiatan ini diharapkan dapat membangun rasa kebersamaan, persatuan, dan saling membantu antar anggota masyarakat untuk mempererat hubungan sosial; menjaga dan mempromosikan nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya sila ke-3 (Persatuan Indonesia); memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat melalui kerjasama dalam menghadapi tantangan, seperti bencana alam atau kesulitan ekonomi; serta menumbuhkan kesadaran dan kesetiakawanan sosial, saling menghormati untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama

3	Sasaran/Target	1. Kader PKK 2. Pelajar 3. Mahasiswa 4. Masyarakat
4	Tempat/Lokasi	1. Kantor Pemerintahan 2. Sekolah 3. Ruang Publik
5	Pelaksana	1. TP PKK Pusat 2. TP PKK Provinsi 3. TP PKK Kabupaten/Kota 4. TP PKK Kecamatan 5. TP PKK Desa/Kelurahan
6	Materi	Tentang Pentingnya Gotong Royong dan Kerukunan Umat Beragama
7	Unsur Narasumber	Pelaksana TP PKK PUSAT 1. Kemenko PMK 2. Kementerian Agama 3. TNI 4. POLRI 5. Narasumber lain yang terkait
		Pelaksana TP PKK Provinsi 1. Kementerian Agama 2. TNI 3. POLRI 4. TP PKK Pusat 5. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 6. Narasumber lain yang terkait
		Pelaksana TP PKK Kabupaten/Kota 1. TNI 2. POLRI 3. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 4. TP PKK Provinsi 5. Narasumber lain yang terkait
		Pelaksana TP PKK Kecamatan 1. TNI 2. POLRI 3. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 4. TP PKK Kabupaten/Kota 5. Narasumber lain yang terkait
		Pelaksana TP PKK Desa/Kelurahan 1. TNI (Babinsa) 2. POLRI (Bhabinkantibmas) 3. TP PKK Kecamatan 4. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan 5. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama 6. Narasumber lain yang terkait
8	Mitra Kerja	1. Kemenko PMK 2. Kementerian Agama 3. TNI

		4. POLRI 5. NGO/Ormas Terkait
9	Laporan Kegiatan	Laporan Kegiatan paling sedikit terdiri dari: 1. Judul Laporan 2. Pendahuluan terdiri dari: • Latar Belakang • Tujuan Kegiatan • Ruang Lingkup 3. Informasi Kegiatan terdiri dari: • Nama Kegiatan • Waktu Pelaksanaan • Lokasi • Narasumber • Peserta • Rundown Acara • Sumber Anggaran 4. Penutup terdiri dari: • Kesimpulan • Saran 5. Lampiran terdiri dari: • Dokumentasi • Data Pendukung (seperti Daftar Hadir, Materi Kegiatan, dll)
10	Metode Kegiatan	Sosialisasi, Ceramah, Lomba, Gotong Royong, dan Beberan

6. Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (KISAK)

NO	Uraian	Keterangan
1	Nama Kegiatan	Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (KISAK)
2	Tujuan Kegiatan	Setelah mengikuti kegiatan ini diharapkan masyarakat memahami pentingnya dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, dan lainnya sebagai identitas resmi yang diakui negara; meningkatkan partisipasi masyarakat untuk aktif melaporkan perubahan data kependudukan (kelahiran, kematian, pindah domisili) guna menjaga keakuratan basis data nasional; mengedukasi tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi untuk mencegah penyalahgunaan, seperti pemalsuan identitas atau penipuan.
3	Sasaran/Target	1. Kader PKK 2. Pelajar 3. Mahasiswa 4. Masyarakat

4	Tempat/Lokasi	1. Kantor Pemerintahan 2. Sekolah 3. Ruang Publik
5	Pelaksana	1. TP PKK Pusat 2. TP PKK Provinsi 3. TP PKK Kabupaten/Kota 4. TP PKK Kecamatan 5. TP PKK Desa/Kelurahan
6	Materi	Tentang Pentingnya Administrasi Kependudukan
7	Unsur Narasumber	Pelaksana TP PKK PUSAT 1. Kementerian Dalam Negeri 2. Narasumber lain yang terkait
		Pelaksana TP PKK Provinsi 1. Kementerian Dalam Negeri 2. TP PKK Pusat 3. Narasumber lain yang terkait
		Pelaksana TP PKK Kabupaten/Kota 1. Kementerian Dalam Negeri 2. TP PKK Provinsi 3. Narasumber lain yang terkait
		Pelaksana TP PKK Kecamatan 1. Kementerian Dalam Negeri 2. TP PKK Kabupaten/Kota 3. Narasumber lain yang terkait
		Pelaksana TP PKK Desa/Kelurahan 1. Pemerintah Desa 2. TP PKK Kecamatan 3. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama 4. Narasumber lain yang terkait
8	Mitra Kerja	1. Kementerian Dalam Negeri 2. NGO/Ormas Terkait
9	Laporan Kegiatan	Laporan Kegiatan paling sedikit terdiri dari: 1. Judul Laporan 2. Pendahuluan terdiri dari: • Latar Belakang • Tujuan Kegiatan • Ruang Lingkup 3. Informasi Kegiatan terdiri dari: • Nama Kegiatan • Waktu Pelaksanaan • Lokasi • Narasumber • Peserta • Rundown Acara • Sumber Anggaran 4. Penutup terdiri dari: • Kesimpulan • Saran 5. Lampiran terdiri dari: • Dokumentasi

		• Data Pendukung (seperti Daftar Hadir, Materi Kegiatan, dll)
10	Metode Kegiatan	Sosialisasi, Pemberian Dokumen Kependudukan, Lomba, dan Beberan



BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. Pembinaan

1. TP PKK PUSAT

- a. Pemberian pedoman;
- b. Pemberian materi;
- c. Peningkatan Pengetahuan dan pemahaman Kelembagaan melalui pembekalan, bimbingan, fasilitasi kepada TP PKK Provinsi dan TP PKK Kabupaten/Kota

2. TP PKK PROVINSI

- a. Pemberian materi;
- b. Peningkatan Pengetahuan dan pemahaman Kelembagaan melalui pembekalan, bimbingan, fasilitasi kepada TP PKK Kabupaten/Kota
- c. Pemberian Penghargaan

3. TP PKK KABUPATEN/KOTA

- a. Pemberian materi;
- b. Peningkatan Pengetahuan dan pemahaman Kelembagaan melalui pembekalan, bimbingan, fasilitasi kepada TP PKK Kecamatan
- c. Pemberian Penghargaan

4. TP PKK KECAMATAN

- a. Pemberian materi;
- b. Peningkatan Pengetahuan dan pemahaman Kelembagaan melalui pembekalan, bimbingan, fasilitasi kepada TP PKK Desa/Kelurahan

5. TP PKK DESA/KELURAHAN

- a. Pemberian materi;
- b. Peningkatan Pengetahuan dan pemahaman Kelembagaan melalui pembekalan, bimbingan, fasilitasi kepada kader PKK

B. Pengawasan

- 1) Pengawasan dilakukan oleh TP PKK secara berjenjang paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- 2) Hasil Pengawasan dilaporkan oleh TP PKK secara berjenjang paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan
- 3) Laporan Hasil Pengawasan TP PKK secara berjenjang digunakan sebagai bahan pertimbangan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan



BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Pemantauan dan Evaluasi

1. Pemantauan dan Evaluasi dilakukan oleh TP PKK secara berjenjang paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
2. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan yang dilakukan oleh TP PKK secara berjenjang untuk mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan
3. Hasil Pemantauan dan Evaluasi oleh TP PKK secara berjenjang sebagai bahan masukan untuk penentuan tindak lanjut pelaksanaan program dan kegiatan

B. Pelaporan

1. Pelaporan dilakukan oleh TP PKK secara berjenjang setiap 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
2. Pelaporan pelaksanaan berkala dilakukan oleh TP PKK secara berjenjang untuk mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan
3. Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dari TP PKK Provinsi kepada TP PKK Pusat dikirim melalui email: Pokjasatu946@gmail.com



BAB V

PENGANGGARAN

BAB V

PENGANGGARAN

Penganggaran pelaksanaan Program dan Kegiatan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan (APBDes/APBKel) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB VI

PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai panduan bagi Pokja I TP PKK dalam melaksanakan program dan kegiatan secara terarah, efektif, dan efisien. Diharapkan Pokja I TP PKK di seluruh Indonesia dapat memahami dan mengimplementasikan setiap poin dalam Juknis ini dengan penuh tanggung jawab, sehingga Visi-Misi PKK untuk memberdayakan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Kami mengucapkan terima kasih atas komitmen dan dedikasi Pokja I TP PKK di seluruh Indonesia. Semoga kerja sama dan semangat kebersamaan terus terjalin dalam menjalankan amanah organisasi. Apabila terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan, kami terbuka untuk menerima masukan demi peningkatan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan ke depan.



LAMPIRAN

LAMPIRAN

DATA KEGIATAN PPK

TP PKK :

TAHUN :

POKJA I

[illegible]

TP - PKK, Tahun	TP PKK: diisi dengan nama tingkatan kepengurusan PKK yang melakukan pendataan. Tahun : diisi dengan periode pelaporan Tahun pendataan; misal Januari-Maret 2025, Januari-Desember 2025 dsb.	
1	Ditulis No Urut Penulisan	
2	Diisi dengan nama tingkatan kepengurusan PKK yang bersangkutan, sesuai dengan tingkatannya: a. Bagi Provinsi diisi dengan nama kabupaten dan kota di wilayahnya. b. Bagi Kota/Kabupaten diisi dengan nama kecamatan di wilayahnya c. Bagi Kecamatan diisi dengan nama desa/kelurahan di wilayahnya d. Bagi Desa/Kelurahan diisi dengan nama dusun/lingkungan yang bersangkutan	
3	Diisi dengan jumlah Kader Umum dan Kader khusus sesuai jenisnya. Contoh: Kader Umum : 50 Kader Khusus: - Kader KRISAN : 5 - Kader KISAK : 3 dst	
4	Diisi Jenis Kegiatan KISAH yang dilaksanakan, boleh mengikuti kegiatan PUSAT atau Kegiatan kreasi/kreatifitas/inovasi setempat. Contoh Kegiatan Pusat: JUPITER (Judi dan Pinjaman On Line Teratasi), LANSIAP (Lansia Siap) , CEPAK (Cegah Perkawinan Anak, CATIN (Pembekalan bagi Calon Pengantin), dan sebagainya	
5, 9, 13	Diisi volume kegiatan (berapa kali kegiatan dilaksanakan)	
6, 10, 14	Diisi metode sosialisasi yang digunakan (contoh: seminar, simulasi, sarasehan, lomba, kampanye on line, pembagian leaf let, konseling, diskusi dll)	
7, 11, 15	Diisi jumlah peserta/keluarga yang hadir/terlibat dalam kegiatan	
8	Diisi Jenis Kegiatan KRISAN yang dilaksanakan, boleh mengikuti kegiatan PUSAT atau Kegiatan kreasi/kreatifitas/inovasi setempat. Contoh Kegiatan Pusat: Pelatihan Fasilitator Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, Sosialisasi kepada anak sekolah, Lomba Vlog SULTAN (Generasi Unggul Tanpa Narkoba) dan CETAR (Cegah Tangkal Narkoba), dll.	
12	Diisi Jenis Kegiatan KILAS yang dilaksanakan, boleh mengikuti kegiatan PUSAT atau Kegiatan kreasi/kretifitas/inovasi setempat. Contoh Kegiatan Pusat: Webinar Obras Kain PKK (Obrolan Santai Kader Inspiratif PKK), Sosilalisasi kepada anak sekolah, temu kader dll.	